

REFORMASI BIROKRASI DI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BITUNG

*Combyan Lombongbitung*¹
*Michael Mantiri*²
*Welly Waworundeng*³

Abstrak

Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk tercapainya tata kelola pemerintahan yang ideal dengan adanya perubahan-perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan agar dapat terciptanya pelayanan yang memadai. Sehingga apabila dalam kenyataan yang terjadi Reformasi Birokrasi belum berjalan sesuai tujuan yang ada maka perlu diadakan perbaikan dan di tata kembali. Reformasi Birokrasi juga merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dengan tujuan efektifitas, efisien, dan akuntabilitas, demi terciptanya sumber daya aparatur negara yang profesional. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk mengetahui bagaimana Reformasi Birokrasi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bitung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Birokrasi yang ada belum berjalan sesuai apa yang diharapkan maka dengan demikian perlu adanya Reformasi Birokrasi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bitung, dikarenakan sesuai indikator penelitian yang dilakukan yakni Birokrasi yang Melayani, Efektif dan Efisien, serta Birokrasi yang transparan belum berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Reformasi, Birokrasi.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Di Indonesia Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan dalam praktiknya diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 yang menjelaskan bahwa program penataan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kelembagaan pemerintah pusat dan daerah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, sehingga organisasi birokrasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran. Menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Rencana reformasi birokrasi yang dijabarkan dalam peta jalan (road map) reformasi birokrasi tersebut harus menjadi panduan bagi pengelola reformasi birokrasi pada tingkat nasional maupun instansi pemerintah dalam melakukan langkah-langkah konkrit dalam hal memperbaiki kualitas birokrasi pemerintahan. Sesuai dengan Road Map reformasi birokrasi ditahun 2017 untuk menuju birokrasi yang bersih dan akuntabel sasarannya yaitu: 1) meningkatnya integritas birokrasi, 2) meningkatnya sinegritas sistem pengawasan, 3) meningkatnya sinegritas sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja, 4) meningkatnya keterbukaan sistem pelaporan, 5) meningkatnya penerapan sistem reward and punishment dalam manajemen kinerja nasional, 6) meningkatnya keselarasan antara kinerja individu dengan kinerja organisasi, 7) meningkatnya Independensi APIP, 8) meningkatnya pengendalian internal di lingkungan instansi pemerintah, 9) meningkatnya sinegritas sistem pelaporan. Dalam Road Map ditahun 2017 untuk menuju birokrasi yang efektif dan efisien

sasarannya yaitu: 1) meningkatnya kualitas dan intensitas pelaksanaan reformasi birokrasi 2) meningkatnya ketepatan ukuran dan fungsi kelembagaan, 3) meningkatnya efisiensi, 4) meningkatnya kecepatan proses penyelenggaraan pemerintahan, 5) meningkatnya sinergi fungsi dan kewenangan antar instansi pemerintah, 6) meningkatnya penggunaan teknologi informasi, 7) meningkatnya keterbukaan informasi publik, 8) meningkatnya penerapan manajemen SM yang berbasis merit, 9) meningkatnya kesejahteraan SDM Aparatur, 10) meningkatnya transparansi dalam rekrutmen pegawai, 11) meningkatnya harmonisasi peraturan perundang-undangan, 12) meningkatnya dukungan publik terhadap penerapan kebijakan pemerintah. Dalam Road Map ditahun 2017 untuk menuju dimana birokrasi Indonesia menjadi birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas yaitu: 1) meningkatnya kemudahan, kepastian dan kecepatan proses pelayanan, 2) meningkatnya aksesibilitas pelayanan, 3) meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan, 4) meningkatnya kompetensi SDM pelayanan, 5) meningkatnya inovasi dalam pelayanan publik, 6) meningkatnya partisipasi publik dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan, 7) meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, 8) meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah, 9) meningkatnya investasi dalam negeri.

Namun pada realita yang terjadi implementasi Reformasi Birokrasi belum berjalan sesuai yang diinginkan. Dalam hal ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menilai masih banyak daerah yang penyelenggaraan Reformasi Birokrasi belum sesuai

harapan serta bermasalah, sekitar 370 lebih daerah nilai penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di bawah B yang artinya masih banyak PR bagi kita untuk memperbaiki agar daerah-daerah tersebut nanti akan naik kelas menjadi nilai B, karena jika yang memiliki nilai di bawah B tersebut dapat diperbaiki menjadi B maka akan memperbaiki sistem administrasi pemerintahan yang ada. Pemerintah daerah yang diberi nilai A (80-90) atau B (70-80) adalah daerah yang kegiatan kerjanya sesuai dengan visi-misi sedangkan pemerintah daerah yang memiliki nilai B ke bawah karena banyaknya kegiatan mubazir dan tidak nyambung, bahkan total ada Rp 400 triliun anggaran habis tapi hasilnya tidak jelas (Dikutip dari www.detiknews.com, pada tanggal 17 mei tahun 2017).

Berdasarkan fenomena yang terjadi di atas dan juga Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 yang telah dijelaskan, maka muncul pertanyaan bagaimana Reformasi Birokrasi di Daerah apakah sudah berjalan sesuai program nasional dan sesuai yang diharapkan? Dalam hal ini yang menjadi daerah penelitian adalah Kota Bitung Sulawesi Utara, lebih khususnya di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bitung. Karena melihat kondisi yang ada masyarakat Kota Bitung Kota Bitung sangat bergantung pada hasil lautnya dan Dinas Kelautan dan Perikanan tentunya berperan penting dalam pengelolaan industri perikanan di Kota Bitung.

Dalam perannya Dinas Kelautan dan Perikanan harus melayani masyarakat dengan baik tapi pada kenyataannya masih ada masyarakat yang mengatakan bahwa pelayanan yang ada masih terkesan lambat masyarakat harus menunggu cukup lama, pegawai masih belum berada di kantor dan program-

program yang ada juga belum sepenuhnya berjalan merata. Salah satu contohnya Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki tugas untuk melayani masyarakat lewat program-program yang ada program-program tersebut seperti bantuan untuk pengembangan perikanan tangkap yang diberikan, dan pada penelitian yang dilakukan sebelumnya dari data yang diperoleh sekitar 60% responden mengatakan bahwa untuk pengembangan perikanan tangkap mereka kurang setuju jika dikatakan pemberian bantuan sudah tepat sasaran dan hanya sebanyak 40% mengatakan sudah tepat sasaran, karena sebagian besar Nelayan berpendapat mengatakan ada nelayan yang sudah kedua kalinya mendapatkan bantuan sementara lainnya belum pernah sama sekali mendapat bantuan. Bahkan ketika diambil data dari responden para Anak Buah Kapal di Kecamatan Aertembaga sebanyak 62,5% mengatakan mereka tidak setuju dan 37,5% mengatakan kurang setuju jika dikatakan pemberian bantuan sudah tepat sasaran karena sama halnya dengan data sebelumnya para Anak Buah Kapal juga berpendapat bahwa bantuan yang disalurkan seringkali diberikan kepada kelompok nelayan yang sebelumnya sudah menerima bantuan.

Selain itu juga Dinas Kelautan dan Perikanan bertugas untuk melayani sebaik mungkin para masyarakat agar dapat mengurus Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP), tapi dalam hal ini masih ada informasi dari masyarakat bahwa terkait hal tersebut masyarakat masih belum paham dan masih bingung cara pengurusannya dan juga kurang informasi terkait hal tersebut, hal ini sangat penting agar dengan adanya kapal nelayan 5 Groston (GT) kebawah yang sesuai dengan aturan untuk mengurus BPKB dapat terkoordinir dengan baik, karena hal itu akan

mendorong semangat para nelayan untuk mencari nafkah bahkan bertambah banyak lagi masyarakat nelayan yang ada sehingga juga dapat berdampak dalam proses terpenuhinya bahan baku di Unit Pengolahan Ikan, karena kita ketahui bersama dari data Asosiasi Unit Pengolahan Ikan (UPI) juga menjelaskan bahwa industri pengolahan ikan di Kota Bitung mengalami permasalahan tingkat utilitas yang kian mendekati titik nadir akibat kekurangan bahan baku. Pasokan bahan baku terus merosot sejak alih muat atau transshipment dilarang di akhir 2014 tak kunjung memperbaiki keadaan. Basmi Said Ketua Asosiasi UPI Kota Bitung juga mengatakan tingkat utilitas pabrik pengolahan ikan di Bitung per Maret 2017 hanya mencapai 62 ton per hari atau 4,38% dari kapasitas terpasang sebesar 1.414 ton per hari sebanyak 60% dari bahan baku yang diproduksi pabrik bahkan di pasok dari luar Bitung (Dikutip dari www.bisnis.com, pada tanggal 27 april tahun/2017).

Dengan adanya Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 9/Permen-Kp/2016 juga yaitu tentang lingkup urusan pemerintah bidang kelautan dan perikanan yang dilimpahkan kepada pemerintah provinsi yaitu, Kapal dengan 5 grosston (GT) ke bawah tidak harus memiliki ijin tetapi BPKP sedangkan 5 grosston (GT) ke atas harus memiliki surat ijin untuk menangkap ikan yang surat ijin ini pun harus mengurusnya di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, menyebabkan situasi yang sulit bagi para nelayan membuat para nelayan bingung dalam hal mengurus surat ijin serta berdampak kekurangan bahan baku yang sangat terasa di unit pengolahan ikan (UPI) Kota Bitung sebanyak 52 unit. Juga kurangnya nelayan yang menyuplai karena kebanyakan hanya kapal 5 grosston

kebawah yang menyuplai bahan baku dan otomatis tidak memenuhi kebutuhan pabrik pengolahan ikan, karena sangat minim kapasitas dan serba terbatas, sedangkan 10 grosston keatas mendapat kendala dalam mengurus surat ijin juga kendala dalam hal aturan tentang alih muat (Dikutip dari Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Sam Ratulangi oleh Eka Pramanan, tahun 2017 yang berjudul Kebijakan Pemerintah Kota Dalam Menggali Pendapatan Asli Daerah Di Sektor Perikanan Kota Bitung).

Tinjauan Pustaka

Perkembangan konsep birokrasi sebenarnya merupakan salah satu varian dari jenis pemerintahan demokrasi dan aristokrasi sebagaimana yang dapat dilihat dari tulisan de Goumay dan Mill. Para teoritis pada abad ke-19 seperti Van Mohl, Olzewski dan Le Play banyak memfokuskan kepada ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah dan melihat birokrasi sebagai hasrat pegawai negeri yang digaji untuk selalu mencampuri urusan orang lain. Dalam Ilmu Administrasi Publik, birokrasi memiliki sejumlah makna, di antaranya adalah pemerintahan yang dijalankan oleh suatu biro yang biasanya disebut dengan officialism, badan eksekutif pemerintah (the executive organs of government), dan keseluruhan pejabat publik (public officials), baik itu pejabat tinggi ataupun rendah. Dalam konteks Indonesia, lembaga pemerintah pada umumnya memiliki hierarki yang panjang, prosedur dan standar operasi yang tertulis, spesialisasi yang rinci, dan pajabat karier yang menjadi karakteristik birokrasi Weberian. Oleh karena itu, lembaga pemerintah sering disebut sebagai birokrasi pemerintah. Karena kinerja birokrasi pemerintah pada umumnya cenderung buruk dan mengecewakan, khususnya yang

berkaitan dengan pelayanan publik, sehingga pandangan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah 12 cenderung negatif yang pada akhirnya menimbulkan stereotif yang negatif tentang konsep birokrasi Weberian (Albrow, 2006:116-117).

Menurut Robbins (2006:338), konsep birokrasi ideal dari Weber yang terdiri dari 7 elemen, sebagai berikut:

- a. Spesialisasi pekerjaan, yaitu semua pekerjaan dilakukan dalam kesederhanaan, rutinitas dan mendefinisikan tugas dengan baik.
- b. Hierarki kewenangan yang jelas, yaitu sebuah struktur multi tingkat yang formal, dengan posisi hierarki atau jabatan, yang memastikan bahwa setiap jabatan yang lebih rendah berada di bawah supervisi dan kontrol dari yang lebih tinggi.
- c. Formalisasi yang tinggi, yaitu semua anggota organisasi diseleksi dalam basis kualifikasi yang didemonstrasikan dengan pelatihan, pendidikan atau latihan formal.
- d. Pengambilan keputusan mengenai penempatan pegawai yang didasarkan atas kemampuan, yaitu keputusan tentang seleksi dan promosi didasarkan atas kualifikasi teknis, kemampuan dan prestasi para calon.
- e. Bersifat tidak pribadi (impersonalitas), yaitu sanksi-sanksi diterapkan secara seragam dan tanpa perasaan pribadi untuk menghindari keterlibatan dengan keperibadian individual dan preferensi pribadi para anggota.
- f. Jejak karier bagi para pegawai, yaitu para pegawai diharapkan mengejar karier dalam organisasi. Sebagai imbalan atas komitmen terhadap karier tersebut, para pegawai mempunyai masa jabatan, artinya mereka akan dipertahankan meskipun mereka tidak berfungsi

atau jika kependaiannya tidak terpakai lagi.

- g. Kehidupan organisasi yang dipisahkan dengan jelas dari kehidupan pribadi, yaitu pejabat tidak bebas menggunakan jabatannya untuk keperluan dan kepentingan pribadinya termasuk keluarganya.

Birokrasi memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah fungsi pengaturan. Fungsi ini mutlak terselenggara dengan efektif, karena suatu pemerintahan negara diberi wewenang untuk melaksanakan berbagai peraturan perundang-undangan yang ditentukan oleh lembaga legislatif melalui berbagai ketentuan pelaksanaan dan kebijaksanaannya. Persoalan yang sering muncul dalam praktik, acapkali terjadi kekakuan dalam implementasi aturan. Kekakuan ini dapat terlihat pada interpretasi secara harfiah, padahal yang lebih diperlukan adalah menegakkan hukum dan peraturan itu dilihat dari semangat dan jiwanya, artinya bahwa pendekatan yang digunakan adalah pendekatan situasional (Sondang, 2008: 147).

Menurut Sedarmayanti (2009:72), Reformasi Birokrasi merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dengan tujuan efektifitas, efisien, dan akuntabilitas. Dimana reformasi biokrasi itu mencakup beberapa perubahan yaitu:

- a. Perubahan cara berfikir (pola pikir, pola sikap, dan pola tindak), perubahan yang dimaksud yaitu birokrasi harus merubah pola berfikir yang terdahulu (buruk), birokrasi harus memiliki pola pikir yang sadar bahwa mereka sebagai pelayan masyarakat, mereka harus memiliki sikap dan pola tindak yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam artian tidak menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan.

- b. Perubahan penguasa menjadi pelayan, perubahan yang dimaksud yaitu birokrasi harus merubah sikap mereka, karena dapat kita ketahui bahwa selama ini birokrasi selalu menganggap bahwa mereka adalah penguasa karena memiliki jabatan yang tinggi dibanding masyarakat sehingga mereka membuat mereka beranggapan bahwa mereka adalah penguasa yang harus selalu dihormati. Oleh karenanya hal seperti itu harus dihilangkan dari birokrasi.
- c. Mendahulukan peranan dari wewenang, perubahan yang dimaksud yaitu birokrasi harus selalu mendahulukan perananannya yaitu sebagai pelayan masyarakat harus dapat melayani masyarakat dengan baik, dengan cara menyampingkan wewenang mereka sebagai pejabat atau pegawai pemerintah.
- d. Tidak berfikir hasil produksi tapi hasil akhir, perubahan yang dimaksud yaitu birokrasi harus selalu mengutamakan hasil akhir dari pelayanan yang mereka berikan kepada masyarakat seperti menciptakan kepuasan pada masyarakat.
- e. Perubahan manajemen kinerja, perubahan yang dimaksud yaitu merubah manajemen kinerja birokrasi agar dapat menjadi lebih efektif dibandingkan sebelumnya.

Untuk mereformasi birokrasi ada beberapa hal yang dirubah dari birokrasi itu sendiri atau merupakan suatu upaya perubahan yang dilakukan oleh pemerintah pada sistem penyelenggaraan pemerintahan untuk menciptakan atau membuat keadaan menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya dengan melibatkan birokrasi sebagai sasaran perubahan agar birokrasi menjadi lebih berkualitas (Widjaja, 2011:75).

Menurut Sulisty (2009:126), menjalankan tata pemerintahan saat ini telah dipengaruhi oleh paradigma Good Governance yang didasarkan kepada pendekatan manajemen baru. Pendekatan penerapan paradigrama Good Governance ini dicirikan oleh Hughes yakni sebagai berikut:

- a. Perubahan yang besar pada orientasi administrasi negara tradisional menuju perhatian pencapaian hasil dan pertanggungjawaban.
- b. Menjadikan suatu organisasi, pegawai dan kondisi birokrasi menjadi lebih luwes (fleksibel).
- c. Membuat indikator kinerja dalam pencapaian tujuan organisasi publik, termasuk evaluasi pelaksanaan program.
- d. Memiliki komitmen politik kepada pemerintah dan tidak lagi bersifat netral dan nonpartisipan.
- e. Fungsi pemerintah dapat dinilai lewat satu ujian.
- f. Mengurangi peranan pemerintah melalui upaya privatisasi.

Menurut Hasibuan (2007:25) Paradigma Good Governance memunculkan sebuah konsep baru yang dikenal dengan istilah Reinventing Governance yang dikemukakan oleh Osborne dan Gaebler. Prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan birokrasi publik menurut Osborne dan Gaebler sudah seharusnya berubah dari konsep konvensional menjadi modern. Maka Osborne dan Gaebler memberikan prinsip-prinsip yang dapat diterapkan dan digunakan oleh para birokrat untuk menjalankan tata pemerintahan menggunakan konsep Reinventing Governance yang saat ini mulai diterapkan dalam sistem pemerintahan untuk menjawab bahwa dengan dilakukannya reformasi birokrasi maka tata pemerintahan akan berjalan dengan efektif dan efisien.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dimaksudkan untuk memberi gambaran secara jelas suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, khususnya Reformasi Birokrasi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bitung.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah Bagaimana Reformasi Birokrasi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bitung dengan melihat perubahan-perubahan yang terjadi dalam Birokrasi Pemerintah khususnya di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bitung.

Menurut Sedarmayanti (2009:72), Reformasi Birokrasi merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dengan tujuan efektifitas, efisien, dan akuntabilitas. Dimana reformasi birokrasi itu mencakup beberapa perubahan yaitu:

1. Perubahan cara berfikir (pola pikir, pola sikap, dan pola tindak), perubahan yang dimaksud yaitu birokrasi harus merubah pola berfikir yang terdahulu (buruk), birokrasi harus memiliki pola pikir yang sadar bahwa mereka sebagai pelayan masyarakat, mereka harus memiliki sikap dan pola tindak yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam artian tidak menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan.
2. Perubahan penguasa menjadi pelayan, perubahan yang dimaksud yaitu birokrasi harus merubah sikap mereka, karena dapat kita ketahui bahwa selama ini birokrasi selalu menganggap bahwa mereka adalah penguasa karena memiliki jabatan yang tinggi dibanding masyarakat sehingga mereka membuat mereka beranggapan bahwa mereka adalah penguasa yang harus selalu dihormati. Oleh karenanya hal

seperti itu harus dihilangkan dari birokrasi.

3. Perubahan manajemen kinerja, perubahan yang dimaksud yaitu merubah manajemen kinerja birokrasi agar dapat menjadi lebih efektif dibandingkan sebelumnya.

Informan atau sampel penelitian adalah sebagian dari keseluruhan individu yang menjadi objek penelitian. Yang dilibatkan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. (Mardalis, dalam buku Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, 2002).

Adapun rincian informan atau sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Kepala Dinas/Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bitung/Pegawai yang diberi wewenang
- Manager/Staf/Karyawan perusahaan/Sarjana Kelautan dan Perikanan
- Nelayan Kota Bitung

Hasil Penelitian

Perubahan penguasa menjadi pelayan, perubahan yang dimaksud yaitu birokrasi harus merubah sikap mereka, karena dapat kita ketahui bahwa selama ini birokrasi selalu menganggap bahwa mereka adalah penguasa karena memiliki jabatan yang tinggi dibanding masyarakat sehingga mereka membuat mereka beranggapan bahwa mereka adalah penguasa yang harus selalu dihormati. Oleh karenanya hal seperti itu harus dihilangkan dari birokrasi.

Menurut Sinambela (2011:5) pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan

pokok dan tatacara yang telah ditetapkan. Dengan demikian dari teori di atas dapat disimpulkan bahwa sikap para aparatur negara yang seharusnya adalah melayani kepentingan masyarakat sesuai dengan aturan yang sudah ada, aparatur birokrasi harus mampu merubah sikap penguasa menjadi pelayan. Karena apabila tidak dilaksanakan akan bertentangan dengan aturan yang berlaku juga ketentuan-ketentuan yang ada sehingga dapat menyebabkan sanksi pegawai bagi yang melanggar.

Berdasarkan teori yang ada dan informasi penelitian yang ditemukan di lapangan (Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Bitung, Staf Perusahaan Industri Pengolahan Ikan/Sarjana Ilmu Kelautan dan Perikanan, dan Nelayan Kota Bitung) tentang Reformasi Birokrasi Di Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Bitung peneliti menemukan bahwa Aparatur Sipil Negara yang ada sudah baik dalam bersikap, dan menjadikan diri benar-benar adalah pelayan masyarakat, lebih khususnya memiliki etika dalam pelayanan publik hal ini juga dikatakan oleh semua informan dimana setiap masyarakat yang datang untuk meminta pelayanan selalu di ladei dan diberi ruang interaksi baik.

Perubahan manajemen kinerja, perubahan yang dimaksud yaitu merubah manajemen kinerja birokrasi agar dapat menjadi lebih efektif dibandingkan sebelumnya.

Menurut Wibowo (2007:9) Manajemen kinerja merupakan gaya manajemen dalam mengelola sumber daya yang berorientasi pada kinerja yang melakukan proses komunikasi secara terbuka dan berkelanjutan dengan menciptakan visi bersama dan pendekatan strategis serta terpadu sebagai kekuatan pendorong untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sudah

semestinya aparatur birokrasi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bitung mengimplementasikan kinerja yang baik, terbuka serta berkelanjutan dan dengan terpadu bahkan harus terus lebih baik dari sebelumnya. Karena apabila manajemen kinerja tidak dilakukan dengan baik atau tidak ada peningkatan akan berdampak dalam kebutuhan masyarakat bahkan tidak akan berkembangnya kemajuan instansi yang ada secara khusus dan Daerah yang ada secara umum.

Berdasarkan informasi penelitian yang ditemukan di lapangan (Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Bitung, Staf Perusahaan Industri Pengolahan Ikan/Sarjana Ilmu Kelautan dan Perikanan, dan Nelayan Kota Bitung) serta teori yang sudah disertakan maka Peneliti menemukan bahwa Dinas Kelautan Dan Perikanan sudah menjalankan kinerja cukup baik dengan perkembangan industri perikanan yang cukup pesat begitu pula dengan pemulihan ekonomi yang begitu cepat dari dampak Moratorium, dengan adanya program yang bertambah begitu pun aktifitas yang lebih banyak, aparatur di Dinas Kelautan dan Perikanan sudah mengembangkan kinerja dengan baik dan bisa dikatakan cepat tepat. Hal yang perlu lebih diperhatikan tentang realisasi program yang berjalan mulai dari implementasi program sampai sasaran yang dituju karena dari informasi yang didapat untuk program yang ada masih ada yang salah sasaran misalkan untuk bantuan yang disalurkan, juga dalam hal terkait untuk informasi aktifitas dari Dinas Kelautan dan Perikanan perlu ditingkatkan karena dilihat masyarakat masih kurang informasi terkait program yang berjalan begitu pun aktifitas dari Dinas Kelautan dan Perikanan itu sendiri perlu lebih lagi ada transparansi agar supaya hal ini dapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang

keterbukaan informasi publik untuk masyarakat.

Kesimpulan

1. Pelayanan Publik Di Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Bitung sudah berjalan baik dan sesuai aturan hanya saja untuk implementasi program di lapangan harus lebih diperhatikan dan juga informasi pelayanan publik harus lebih ditingkatkan
2. Perlu adanya peningkatan kinerja aparatur birokrasi terus menerus agar supaya program yang berjalan lebih tepat sasaran, pelayanan tidak terkesan lambat, salah sasaran ataupun kurang maksimal seperti halnya pemberian bantuan, pengadaan bahan baku, alat tangkap dan lain-lain bisa terpenuhi secara menyeluruh
3. Dalam menjalankan tujuan nasional dan visi misi pemerintah daerah Dinas Kelautan sudah cukup baik, usaha dalam memajukan Kota Bitung yang adalah kota cakalang (bergantung pada industri kelautan dan perikanan) juga cukup maksimal. Hal-hal terkait kebijakan kementerian yang meresahkan masyarakat seperti moratorium ataupun kebijakan-kebijakan serupa dari pemerintah pusat yang dianggap kurang berpihak untuk nelayan yang ada di Kota Bitung dengan berbagai pertimbangan, semoga bisa segera diambil solusi atau pun juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat mencari jalan keluar secepatnya

Saran

1. Implementasi program dan pembagian bantuan harus terus ditingkatkan. Jikalau pun ditemukan ada oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, diharapkan pimpinan segera menindak. Dan juga untuk informasi pelayanan

publik diharapkan bisa lebih mudah dijangkau oleh masyarakat mungkin juga bisa ditambah melalui media sosial serta dapat bekerja sama dengan media-media cetak atau online, dinas-dinas terkait bahkan masyarakat umum. Karena informasi tentang Dinas Kelautan dan Perikanan memang masih sangat minim dijangkau, bahkan peneliti pun dalam menemukan struktur birokrasi Dinas Kelautan dan Perikanan secara online masih belum bisa kemudian gambaran umum birokrasi Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Bitung di media sosial ataupun informasi di dalam wadah lainnya masih cukup sulit dijangkau.

2. Perlu ada usaha lebih yang dilakukan dari Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mengusahakan kebutuhan masyarakat secara merata, mulai dari perencanaan penganggaran dan program serta koordinasi yang intens dengan masyarakat dalam hal melihat kebutuhan masyarakat yang ada agar supaya tidak muncul anggapan tentang kurangnya pemerataan.
3. Dinas kelautan Dan Perikanan harus lebih terbuka dan transparan terkait informasi Di Dinas Kelautan dan Perikanan yang adalah instansi pemerintah sebagai pelayan masyarakat serta dapat menjelaskan secara baik kepada masyarakat tentang keluhan yang ada, jika terkait dari aturan dan kebijakan kementerian atau pemerintah pusat cobalah memberi pengertian bahkan sosialisasi tentang maksud dan tujuan pemerintah, apabila hal tersebut merupakan hal yang urgen bahkan berdampak pada perekonomian dan nasib hidup masyarakat diharapkan Dinas Kelautan Dan Perikanan bisa langsung lebih berani mengambil

langkah solutif dan berkoordinasi segera mungkin dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk mencari solusi dan mengusahakan kesejahteraan rakyat. Terkait dengan aturan-aturan yang berlaku bahkan jika nanti akan muncul yang tidak berpihak pada rakyat diharapkan Dinas Kelautan Dan Perikanan segera merespon dan mensiasati keluhan dan permasalahan yang ada. Juga aktif dalam pengawasan dan pemeberian solusi tentu juga bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya seperti DPRD, Pemerintah Provinsi untuk dapat menciptakan peraturan perundang-undangan yang berpihak pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Albrow. 2006. Birokrasi. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Hasibuan, S. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Komarudin. 2014. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik. Cetakan Pertama, Jakarta: Ganesindo.
- Mardalis. 2002. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: Bumi Aksara.
- Miles, M.B & Huberman A.M.1984. Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Rohidi, T. 1992. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Nasution. 1998. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsito.
- Robbins,S. 2008. Perilaku Organisasi. Jakarta: Salemba Empat.
- Sedarmayanti. 2010. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan, Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang baik. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sri Hartini, Tedi Sudrajat, Setiajeng Kadarsih. 2008. Hukum Kepegawaian Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sondang. 1994. Patologi Birokrasi, Analisis, Identifikasi dan Terapinya. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2003. Metode Penelitian Bisnis. Edisi 1. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyo, B. 2009. Pengantar Ilmu Perpustakaan. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Sumadi, B. 1998. Metodologi Penelitian. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Thoha, M. 2003. Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pres.
- Widjaja, H. 2011. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.